

## ABSTRAK

Dalam eksekusi Hak Tanggungan sering kali dijumpai permasalahan salah satunya karena pihak Terlelang tidak mengosongkan objek eksekusi secara suka rela sehingga melakukan upaya hukum berupa perlawanan. Penelitian hukum ini berjudul “Perlawanan yang Tidak Dapat Diterima dalam Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Terhadap Putusan Negeri Purwokerto Nomor 01/Pdt.Plw/2015/PN.Pwt). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima dalam Eksekusi Hak Tanggungan pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 01/Pdt.Plw/2015/PN.Pwt serta bagaimana akibat hukum bagi para pihak.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data sekunder yaitu diperoleh dengan cara inventarisasi peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, artikel, hasil penelitian sebelumnya, dan putusan hakim. Jenis dan data yang digunakan dalam menganalisis dan mengumpulkan data dilakukan dengan cara normatif kualitatif.

Hasil penelitian dapat diketahui dari pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perlawanan Pelawan menyatakan tidak dapat diterima karena Perlawanan Pelawan tidak memenuhi syarat formil berupa waktu pengajuan Perlawanan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014. Majelis hakim dalam mempertimbangkan putusannya telah sesuai dengan Pasal 136 HIR dan Pasal 200 ayat (11) HIR. Akibat hukum dari putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, bagi Pelawan dapat mengajukan perlawanan kembali dengan cara memperbaiki formalitas perlawanannya dan menunggu hingga waktu diperbolehkannya mengajukan perlawanan yaitu setelah dikeluarkan Surat Penetapan Eksekusi Pengosongan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto, atau terhadap Para Pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan upaya hukum banding.

Kata kunci: Perlawanan, Eksepsi, Eksekusi Hak Tanggungan

## ***ABSTRACT***

The execution of Mortgage Right often encounters problems, such as the third parties do not empty the object of execution voluntarily so that they make legal effort in the form of resistance. This legal research entitled “Unacceptable Resistance in the Execution of Mortgage Right (A Study on the Verdict of Purwokerto District Court No. 01/Pdt.Plw/2015/PN.Pwt). This research aimed to determine the Judge’s legal consideration declaring that resistor’s resistance can not be accepted in the execution of the Mortgage Right on the verdict of Purwokerto District Court No. 01/Pdt.Plw/2015/PN.Pwt and how the legal consequence for the parties.

This research used normative juridical approach method. The research specification used descriptive analysis. Data collection method was performed by collecting secondary data obtained by inventorying legislations, textbooks, journals, articles, previous researches results, and verdict of judge. The type and data used in analyzing and collecting data were performed by qualitative normative method.

The result indicated that the consideration of the Panel of Judges in deciding the resistor’s resistance declared unacceptable because the resistor’s resistance did not meet the formal requirements in the form of time of resistance submission as stipulated in SEMA No. 4 of 2014. The Panel of Judges in considering their decision have been in accordance with Article 136 HIR and Article 200 paragraph (11) HIR. The legal consequence of a verdict declares that the lawsuit was unacceptable, the Resistor may file the resistance back by fixing the formality of their resistance and waiting until the time allowed to file the resistance which was after the issuance of a Letter of Stipulation of Execution of Emptying the Object by Purwokerto District Court, or to the parties who object to file an appeal lawsuit.

**Keywords:** Resistance, Execution, Execution of Mortgage Right.